



EDITORIAL

TARIK ULUR KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diwacanakan oleh pemerintah beberapa bulan terakhir ini terus menghiasi ruang publik. Meskipun jika kita perhatikan intensitasnya mulai berkurang pascakeputusan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM. Namun, bukan berarti penundaan ini lantas mengurungkan niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk menaikkan harga BBM dengan memperhatikan harga minyak dunia. Jika harga minyak dunia naik melebihi batas yang diproyeksikan dalam APBN, otomatis pemerintah mau tidak mau menaikkan harga BBM demi mengurangi beban APBN untuk subsidi BBM yang melonjak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, beban subsidi BBM pada APBN dipatok sebesar Rp 68,7 triliun namun realisasinya mencapai Rp. 82,4 triliun. Tahun 2011 dianggarkan Rp 96 triliun dan realisasinya mencapai Rp 165,2 triliun. Tahun 2012 dianggarkan di APBN sebesar Rp. 123,6 triliun. Beban subsidi pada tahun 2012 ini kemungkinan bisa lebih tinggi jika harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Rencana pemerintah itu ternyata disambut resistensi oleh masyarakat umum, buruh dan mahasiswa yang langsung menggelar demonstrasi menentang rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak pada semakin beratnya beban hidup. Penolakan yang dilakukan masyarakat pun tak pelak menjadi komoditas bagi lawan-lawan politik pemerintah untuk menyerang dari berbagai sudut. Diskursus mengenai perlu tidaknya menaikkan harga BBM selalu menghiasi *headline* media massa. Termasuk wacana konversi penggunaan BBM ke gas, tidak tepatnya sasaran yang menikmati BBM, hingga penerbitan kartu kendali BBM. Dibalik tarik ulur itu, tanpa disadari harga-harga kebutuhan pokok di pasaran sudah merangkak naik.

Presiden pun akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan harga mengingat resistensi dan resiko politik yang akan dihadapi. Pemerintah lebih memilih untuk bermain aman dengan mengambil langkah penghematan anggaran

Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, pembatasan BBM (hingga kini mekanismenya masih belum jelas), dan meminta dengan tegas agar kendaraan pemerintah berplat merah untuk menggunakan pertamax.

Dibalik kebijakan akhir yang diputuskan pemerintah, ada satu hal yang sebenarnya disayangkan. Kenapa pemerintah seolah melakukan uji publik untuk melihat respon masyarakat terhadap rencana kenaikan harga BBM. Jika masyarakat tidak bersikap, rencana kenaikan akan dijalankan. Demikian juga sebaliknya. Kegamangan yang ditunjukkan oleh pemerintah ini akhirnya menyebabkan masyarakat yang harus membayar mahal. Efek psikologis pasar yang ditimbulkan tidak sedikit, khususnya respon dari pengusaha yang kemudian harus ditanggung masyarakat dengan kenaikan harga-harga di pasar. Pemerintah seharusnya berani mengeksekusi kebijakan kenaikan harga BBM jika memang hal itu sudah sangat mendesak demi mengurangi beban APBN. Apalagi beban yang ditanggung mencapai Rp. 123, 6 triliun dan hanya dinikmati mereka yang ada di level menengah ke atas.

Akan lebih baik jika beban subsidi itu disalurkan untuk memperbaiki sarana infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan, ketersediaan listrik, pelabuhan, bandar udara dan sektor lain yang dipandang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Selain dirasakan oleh banyak pihak, hal ini juga menjadi investasi bagi pemerintah sendiri dalam memacu daya saing bangsa. Kunci utamanya adalah keberanian pemerintah untuk mengambil konsekuensi yang timbul dari semua keputusan yang diambil. **(Budi Prayitno).**

Sumber gambar : <http://stat.ks.kidsklik.com/statics/files/2012/03/13329096241196578902.jpg>